

**ADAPTASI IMPLEMENTASI KURIKULUM OPERASIONAL SATUAN
PENDIDIKAN (KOSP) DALAM PENGEMBANGAN MUTU PENDIDIKAN
BERBASIS KEBUTUHAN LOKAL DI SMP IT IQRA STABAT**

Putri Suci Ramadhani¹, Nasrul Syakur Chaniago²

¹Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan
Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹Putrisuciramadhani21@gmail.com, ²nasrulsyakurchan@uinsu.ac.id

ABSTRACT

The School Operational Curriculum (Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan/KOSP) enables schools to translate the national curriculum into learning that reflects student characteristics and local needs. This study describes KOSP adaptation at SMP IT IQRA Stabat, analyzes locally responsive quality development, and identifies supporting and inhibiting factors. A descriptive qualitative case study was conducted using observation, in-depth interviews, and document review with the principal, vice principal for curriculum, and teachers. Data were analyzed through reduction, display, and conclusion drawing, supported by triangulation and member checking. The findings show that adaptation proceeded through policy socialization, team formation, needs analysis, document development, review, and approval. Local responsiveness was expressed through Islamic values, Malay culture, practical skills, social activities, and Pancasila Student Profile projects. Implementation was supported by school leadership, teacher willingness to learn, education-office training and supervision, and parent-community participation. Constraints included uneven teacher understanding, administrative workload, limited facilities, transition difficulties, and differences in teacher readiness. Schools responded through staged training, peer discussion, curriculum-team assistance, independent learning, facility proposals, and coordination with supervisors. KOSP has strengthened contextual and character-oriented education, but further improvement requires systematic local-needs mapping, equitable professional development, simplified administration, adequate learning resources, and specific evaluation indicators.

Keywords: KOSP adaptation, local needs, education quality, curriculum implementation, Islamic school

ABSTRAK

Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP) memberi ruang kepada sekolah untuk menerjemahkan kurikulum nasional menjadi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan adaptasi KOSP di SMP IT IQRA Stabat, menganalisis pengembangan mutu berbasis kebutuhan lokal, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi dengan informan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diperkuat dengan triangulasi dan member check. Hasil menunjukkan bahwa adaptasi KOSP dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan, pembentukan tim, analisis kebutuhan, penyusunan dokumen, review, dan pengesahan. Kebutuhan lokal diintegrasikan

melalui nilai Islam, budaya Melayu, keterampilan praktis, kegiatan sosial, dan proyek Profil Pelajar Pancasila. Implementasi didukung oleh kepemimpinan sekolah, kemauan guru belajar, pelatihan dan supervisi dinas, serta partisipasi orang tua dan masyarakat. Hambatan utama meliputi ketimpangan pemahaman guru, beban administrasi, keterbatasan sarana, kesulitan transisi, dan variasi kesiapan guru. Sekolah merespons melalui pelatihan bertahap, diskusi sejawat, bantuan tim kurikulum, pembelajaran mandiri, pengajuan fasilitas, dan koordinasi dengan pengawas. Penguatan selanjutnya memerlukan pemetaan kebutuhan lokal yang sistematis, pelatihan merata, administrasi sederhana, sarana memadai, dan indikator evaluasi khusus.

Kata Kunci: adaptasi KOSP, kebutuhan lokal, mutu pendidikan, implementasi kurikulum, sekolah Islam terpadu

A. Pendahuluan

Kurikulum merupakan penghubung antara tujuan pendidikan nasional dan pengalaman belajar yang diterima peserta didik. Dalam praktiknya, kebijakan kurikulum tidak diterapkan secara mekanis karena setiap sekolah memiliki karakteristik peserta didik, kapasitas organisasi, budaya, sumber daya, dan lingkungan sosial yang berbeda. Kajian implementasi kebijakan pendidikan menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan selalu melakukan proses memahami, menafsirkan, dan menyesuaikan kebijakan dengan pengetahuan serta kondisi organisasinya (Spillane, Reiser, & Reimer, 2002). Karena itu, keberhasilan perubahan kurikulum ditentukan bukan hanya oleh kualitas dokumen kebijakan, tetapi juga oleh kemampuan sekolah mengubah

kebijakan tersebut menjadi praktik yang relevan dan konsisten.

Dalam Kurikulum Merdeka, fungsi penerjemahan tersebut dilaksanakan melalui Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP). KOSP memuat analisis karakteristik satuan pendidikan, visi, misi, tujuan, pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pembelajaran, serta mekanisme evaluasi dan pengembangan profesional. Panduan pengembangan KOSP menegaskan bahwa kurikulum operasional harus berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan pemangku kepentingan (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2022). Kedudukan KOSP kemudian diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 yang memberi ruang

kepada satuan pendidikan untuk mengembangkan kurikulum sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik.

Kebebasan tersebut tidak berarti sekolah dapat mengabaikan standar nasional. KOSP justru berfungsi sebagai instrumen untuk menghubungkan kerangka nasional dengan konteks sekolah. Braun, Ball, Maguire, dan Hoskins (2011) menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh konteks material, profesional, situasional, dan eksternal sekolah. Ball, Maguire, dan Braun (2012) menyebut proses ini sebagai policy enactment, yaitu cara aktor sekolah menafsirkan dan mewujudkan kebijakan melalui keputusan, rutinitas, dan praktik. Perspektif tersebut relevan untuk memahami bahwa adaptasi KOSP bukan sekadar pengisian format, melainkan proses organisasi yang melibatkan kepemimpinan, kapasitas guru, sumber daya, dan hubungan sekolah dengan masyarakat.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan fleksibilitas pada struktur pembelajaran, perangkat ajar, dan penguatan karakter, tetapi sekolah masih

menghadapi persoalan kesiapan guru, pemahaman konsep, dan konsistensi implementasi. Rahayu, Rosita, Rahayuningsih, Hernawan, dan Prihantini (2022) menemukan bahwa implementasi di sekolah penggerak didukung oleh kepemimpinan dan kolaborasi, tetapi memerlukan penguatan kompetensi guru. Rahmadayanti dan Hartoyo (2022) menekankan pentingnya fleksibilitas perangkat ajar dan proyek penguatan karakter, sedangkan Angga, Suryana, Nurwahidah, Hernawan, dan Prihantini (2022) menunjukkan bahwa perubahan kurikulum menimbulkan tantangan adaptasi dan perbedaan kesiapan antarpendidik. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa otonomi kurikulum harus disertai kemampuan sekolah membangun pemahaman bersama.

Adaptasi kurikulum juga berkaitan dengan mutu pendidikan. Mutu tidak hanya merujuk pada nilai akademik, tetapi mencakup relevansi, efektivitas, efisiensi, transformasi peserta didik, dan kesesuaian dengan tujuan pendidikan (Harvey & Green, 1993). Sallis (2014) menempatkan perbaikan berkelanjutan, kepemimpinan,

partisipasi anggota organisasi, dan kepuasan pemangku kepentingan sebagai unsur penting manajemen mutu pendidikan. Dalam konteks KOSP, mutu berarti bahwa kurikulum mampu menghasilkan pembelajaran yang sesuai standar sekaligus bermakna bagi kehidupan peserta didik.

Salah satu jalan untuk meningkatkan relevansi tersebut ialah mengintegrasikan kebutuhan lokal. Kebutuhan lokal mencakup nilai agama, budaya, bahasa, kondisi sosial ekonomi, potensi wilayah, isu lingkungan, dan pengetahuan yang hidup dalam keluarga serta masyarakat. Konsep *funds of knowledge* menjelaskan bahwa keluarga dan komunitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dapat menjadi sumber belajar (Moll, Amanti, Neff, & Gonzalez, 1992). *Culturally relevant pedagogy* menekankan pembelajaran yang menghubungkan keberhasilan akademik, kompetensi budaya, dan kesadaran kritis peserta didik (Ladson-Billings, 1995), sedangkan Gay (2018) menegaskan bahwa responsivitas budaya membantu guru membuat isi dan proses

pembelajaran lebih dekat dengan pengalaman peserta didik.

SMP IT IQRA Stabat merupakan sekolah Islam terpadu di Kabupaten Langkat yang telah menerapkan Kurikulum Merdeka dan menyusun KOSP. Sekolah memiliki karakter khas berupa integrasi standar nasional, nilai Islam, dan kebutuhan masyarakat sekitar. Hasil pengamatan awal menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan adaptasi, tetapi masih menghadapi ketimpangan pemahaman guru, integrasi lokal yang belum sepenuhnya sistematis, keterbatasan sarana, beban administrasi, evaluasi yang belum memiliki indikator khusus, dan variasi partisipasi pemangku kepentingan. Kondisi ini penting dikaji karena perubahan kurikulum yang berkelanjutan memerlukan kedalaman implementasi, kepemilikan lokal, dan kemampuan organisasi mempertahankan praktik baik, bukan sekadar perluasan formal (Coburn, 2003; Fullan, 2016).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) mendeskripsikan proses adaptasi implementasi KOSP di SMP IT IQRA Stabat; (2) menganalisis

pengembangan mutu pendidikan berbasis kebutuhan lokal melalui KOSP; dan (3) mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat, serta strategi sekolah dalam mengatasi hambatan. Penelitian ini memberi kontribusi dengan menempatkan KOSP sebagai praktik manajemen kurikulum kontekstual pada sekolah Islam terpadu, sekaligus memperlihatkan hubungan antara otonomi kurikulum, kapasitas guru, kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan mutu pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, pengalaman, dan proses organisasi dalam konteks alamiah, sedangkan studi kasus memungkinkan peneliti mengkaji secara mendalam suatu sistem yang terikat oleh lokasi dan fokus tertentu (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Kasus dalam penelitian ini adalah adaptasi implementasi KOSP untuk pengembangan mutu pendidikan berbasis kebutuhan lokal di SMP IT

IQRA Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Informan penelitian ditentukan secara purposif berdasarkan pengetahuan dan keterlibatannya dalam penyusunan serta implementasi KOSP. Informan meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan guru. Data dikumpulkan melalui observasi kegiatan manajemen kurikulum dan pembelajaran, wawancara mendalam mengenai kebijakan, proses adaptasi, integrasi kebutuhan lokal, mutu pendidikan, faktor pendukung dan penghambat, serta dokumentasi berupa KOSP, perangkat pembelajaran, program sekolah, dan dokumen evaluasi.

Analisis data mengikuti model interaktif yang terdiri atas kondensasi atau reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Data wawancara, observasi, dan dokumen dikelompokkan berdasarkan tiga fokus penelitian. Pola antarsumber kemudian dibandingkan untuk menemukan kesesuaian, perbedaan, dan hubungan antartema. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member check,

pencatatan proses penelitian, serta penggunaan bukti yang dapat ditelusuri. Langkah tersebut sejalan dengan prinsip credibility, dependability, confirmability, dan transferability dalam penelitian naturalistik (Lincoln & Guba, 1985).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Proses Adaptasi Implementasi KOSP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adaptasi KOSP di SMP IT IQRA Stabat berlangsung melalui tahapan yang terencana, yaitu sosialisasi kebijakan, pembentukan tim penyusun, analisis kebutuhan, penyusunan dokumen, serta review dan pengesahan. Kepala sekolah berperan mengarahkan kebijakan dan memastikan kesesuaian dengan regulasi; wakil kepala sekolah bidang kurikulum mengoordinasikan pekerjaan teknis; sedangkan guru

menyusun alur tujuan pembelajaran, modul ajar, dan perangkat yang digunakan di kelas. Alur tersebut memperlihatkan bahwa sekolah telah membangun pembagian peran dan mekanisme kerja kolektif.

Pada tahap awal, sekolah menyelenggarakan rapat dewan guru dan briefing untuk menyamakan pemahaman mengenai Kurikulum Merdeka. Tim penyusun kemudian dibentuk dari unsur pimpinan dan guru. Analisis kebutuhan dilakukan melalui rapat guru, pengamatan karakteristik peserta didik, serta diskusi dengan orang tua dan komite. Hasil analisis menjadi dasar penyusunan struktur kurikulum, pengorganisasian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, modul ajar, program pembiasaan, dan kegiatan penguatan karakter. Draf dibahas kembali dalam rapat dewan guru sebelum disahkan.

Tabel 1 Tahapan Adaptasi KOSP di SMP IT IQRA Stabat

Tahap	Kegiatan Utama	Pihak Terlibat	Keterangan
Inisiasi	Rapat dewan guru dan sosialisasi kebijakan Kurikulum Merdeka.	Kepala sekolah, guru, pengawas.	Dilaksanakan pada awal tahun ajaran.
Pembentukan tim	Penunjukan tim penyusun KOSP dari unsur pimpinan dan guru.	Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum.	Menetapkan pembagian tugas penyusunan.
Analisis kebutuhan	Identifikasi karakteristik peserta didik, sekolah, dan lingkungan.	Tim kurikulum, wali kelas, orang tua/komite.	Menjadi dasar penetapan prioritas lokal.

Tahap	Kegiatan Utama	Pihak Terlibat	Keterangan
Penyusunan dokumen	Penyusunan struktur kurikulum, ATP, modul ajar, dan program sekolah.	Tim kurikulum dan guru mata pelajaran.	Menghubungkan regulasi dengan konteks sekolah.
Review dan pengesahan	Pembahasan draf, perbaikan, dan pengesahan KOSP.	Kepala sekolah dan dewan guru.	Dilakukan sebelum dokumen digunakan.

Sumber: Hasil penelitian, diolah peneliti.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa KOSP dipahami sebagai hasil penerjemahan kebijakan, bukan sekadar dokumen yang disalin. Temuan ini sejalan dengan Spillane et al. (2002), yang menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan sense-making oleh aktor pelaksana. Guru dan pimpinan sekolah membaca kebijakan melalui pengetahuan sebelumnya, pengalaman mengajar, kebutuhan peserta didik, serta kondisi organisasi. Karena itu, briefing dan diskusi internal penting untuk mengurangi perbedaan penafsiran.

Meskipun alurnya jelas, pemahaman guru belum merata. Tidak semua guru memperoleh pelatihan formal; sebagian belajar melalui platform digital, diskusi sejawat, dan pengalaman langsung di kelas. Situasi tersebut memperlihatkan adanya teacher agency, yaitu kemampuan guru mengambil inisiatif dalam menghadapi perubahan, tetapi agency tersebut sangat dipengaruhi

oleh sumber daya, relasi profesional, dan dukungan organisasi (Priestley, Biesta, & Robinson, 2015). Pembelajaran mandiri membantu proses transisi, namun tidak dapat menggantikan pendampingan sistematis karena kualitas sumber dan kedalaman pemahaman dapat berbeda.

Dalam perspektif policy enactment, perbedaan kesiapan guru merupakan konsekuensi dari variasi konteks profesional dan material sekolah (Braun et al., 2011; Ball et al., 2012). Sekolah telah memiliki struktur penyusunan KOSP, tetapi kedalaman implementasinya masih bergantung pada kemampuan setiap guru menerjemahkan prinsip kurikulum ke dalam tujuan, aktivitas, diferensiasi, dan asesmen. Oleh sebab itu, tahap adaptasi perlu diperluas dari penyusunan dokumen menuju pendampingan praktik kelas dan refleksi bersama.

2. Pengembangan Mutu Pendidikan Berbasis Kebutuhan Lokal

Kebutuhan lokal di SMP IT IQRA Stabat dimaknai sebagai nilai, budaya, keterampilan, dan persoalan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Sekolah mengintegrasikan nilai Islam melalui pembiasaan ibadah, pembelajaran akhlak, kedisiplinan, dan penguatan nilai religius dalam mata pelajaran. Budaya lokal diangkat melalui kegiatan gotong royong, pengenalan budaya Melayu, dan aktivitas yang memperhatikan keberagaman masyarakat Stabat. Keterampilan praktis dikembangkan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan proyek,

sedangkan kepedulian sosial dibangun melalui kegiatan berbasis masyarakat.

Integrasi tersebut berlangsung dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan pembiasaan. Wakil kepala sekolah bidang kurikulum menjelaskan bahwa proyek dan pembiasaan mulai membentuk nilai Profil Pelajar Pancasila. Guru juga menyesuaikan pembelajaran dengan gaya belajar, kondisi kelas, dan keadaan emosional peserta didik. Praktik ini memperlihatkan bahwa KOSP memberi ruang bagi pembelajaran yang lebih responsif, walaupun tingkat pelaksanaannya masih berbeda antarguru.

Tabel 2 Integrasi Kebutuhan Lokal dalam KOSP

Aspek	Bentuk Implementasi	Kontribusi terhadap Mutu
Nilai Islam	Pembiasaan ibadah, akhlak, kedisiplinan, dan integrasi nilai religius dalam pembelajaran.	Menguatkan karakter religius, tanggung jawab, dan budaya sekolah.
Budaya lokal	Gotong royong, pengenalan budaya Melayu, dan pembelajaran berbasis kearifan lokal.	Meningkatkan relevansi pembelajaran dan identitas budaya peserta didik.
Keterampilan praktis	Ekstrakurikuler, proyek, dan aktivitas berbasis potensi lingkungan.	Mengembangkan kecakapan hidup, kerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah.
Kegiatan sosial	Keterlibatan peserta didik dalam aktivitas sekolah dan masyarakat.	Menumbuhkan kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Profil Pelajar Pancasila	Gelar karya, proyek kontekstual, dan pembiasaan karakter.	Menghubungkan identitas nasional dengan nilai Islam dan budaya lokal.

Sumber: Hasil penelitian, diolah peneliti.

Temuan tersebut mendukung pandangan bahwa pengetahuan lokal dan pengalaman keluarga dapat menjadi modal pembelajaran. Moll et al. (1992) menyebutnya sebagai *funds of knowledge* yang perlu dikenali dan dihubungkan dengan aktivitas kelas. Pada sekolah yang memiliki identitas Islam terpadu, nilai agama, praktik keluarga, budaya Melayu, dan pengalaman sosial peserta didik dapat menjadi konteks untuk mengembangkan literasi, numerasi, karakter, dan keterampilan berpikir. Integrasi yang baik tidak berhenti pada simbol atau kegiatan seremonial, tetapi masuk ke dalam tujuan belajar, bahan ajar, pertanyaan pemantik, proyek, dan asesmen.

Pola yang ditemukan juga sejalan dengan *culturally relevant pedagogy*. Ladson-Billings (1995) menempatkan keberhasilan akademik, kompetensi budaya, dan kesadaran kritis sebagai tiga tujuan yang saling berkaitan. Gay (2018) menambahkan bahwa pembelajaran responsif budaya memerlukan pemahaman guru tentang pengalaman peserta didik dan penggunaan konteks tersebut secara terencana. Di SMP IT IQRA Stabat,

nilai Islam dan budaya lokal telah menjadi kekuatan pembentukan karakter, tetapi integrasinya masih lebih kuat pada pembiasaan dan kegiatan proyek daripada pada seluruh mata pelajaran.

Sekolah menilai mutu melalui hasil rapor dan evaluasi belajar, keterampilan praktis, perilaku religius, keterlibatan orang tua, antusiasme, serta motivasi peserta didik. Kepala sekolah melihat adanya peningkatan semangat belajar, relevansi pembelajaran, dan budaya sekolah yang lebih positif. Penggunaan indikator akademik dan nonakademik sesuai dengan pandangan Harvey dan Green (1993) bahwa mutu pendidikan bersifat multidimensional. Akan tetapi, sekolah belum memiliki instrumen khusus untuk mengukur seberapa besar muatan lokal berkontribusi terhadap capaian pembelajaran, karakter, keterampilan hidup, dan keterlibatan peserta didik.

Ketiadaan instrumen khusus membuat evaluasi masih bergantung pada rapor, observasi umum, dan rapat mingguan. Mekanisme tersebut berguna untuk refleksi, tetapi belum cukup untuk membedakan keberhasilan program berbasis kebutuhan lokal dari keberhasilan

program sekolah secara umum. Pendekatan manajemen mutu menuntut indikator, bukti, refleksi, dan perbaikan yang berulang (Sallis, 2014). Sekolah perlu mengembangkan matriks yang menghubungkan kebutuhan lokal, capaian pembelajaran, kegiatan, bukti hasil, dan tindak lanjut.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi KOSP didukung oleh komitmen kepala sekolah, kemauan guru beradaptasi, pelatihan dan supervisi dari dinas pendidikan, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. Kepala sekolah memfasilitasi koordinasi, kebutuhan guru, dan komunikasi dengan pihak eksternal. Guru menunjukkan kemauan belajar melalui pelatihan,

diskusi rekan sejawat, pencarian sumber digital, dan penyesuaian pembelajaran. Dukungan tersebut membuat sekolah tetap dapat menjalankan perubahan meskipun sumber daya belum sepenuhnya memadai.

Di sisi lain, hambatan utama meliputi pemahaman guru yang belum merata, beban administrasi, keterbatasan sarana pembelajaran, proses transisi terhadap perubahan, dan variasi kesiapan antarguru. Hambatan ini saling berkaitan. Guru yang belum memahami substansi KOSP cenderung memandang format baru sebagai tambahan administrasi, sementara keterbatasan media seperti infokus membatasi variasi pembelajaran berbasis teknologi.

Tabel 3 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi KOSP

Kategori	Faktor	Bukti Temuan	Implikasi
Pendukung	Kepemimpinan kepala sekolah	Arahan, fasilitasi, koordinasi, dan komunikasi dengan dinas/pengawas.	Menjaga arah perubahan dan mengurangi ketidakpastian guru.
Pendukung	Komitmen guru	Belajar mandiri, diskusi sejawat, dan penyesuaian praktik kelas.	Mempercepat adaptasi dan pengembangan praktik baru.
Pendukung	Pelatihan dan supervisi	Pelatihan dinas, instruksi teknis, dan pendampingan pengawas.	Menambah pengetahuan dan legitimasi implementasi.
Pendukung	Partisipasi masyarakat	Dukungan komite, orang tua, dan tokoh masyarakat.	Memperkaya informasi kebutuhan serta sumber belajar.

Kategori	Faktor	Bukti Temuan	Implikasi
Penghambat	Pemahaman guru belum merata	Tidak semua guru memperoleh pelatihan formal.	Menimbulkan variasi penafsiran dan konsistensi praktik.
Penghambat	Beban administrasi	Format dan dokumen dinilai kompleks serta menyita waktu.	Mengurangi waktu untuk perencanaan dan interaksi pembelajaran.
Penghambat	Keterbatasan sarana	Media pembelajaran digital belum mencukupi.	Membatasi variasi metode dan pemanfaatan teknologi.
Penghambat	Variasi kesiapan	Sebagian guru lebih cepat menerima perubahan daripada guru lain.	Membutuhkan pendampingan yang berbeda dan berkelanjutan.

Sumber: Hasil penelitian, diolah peneliti.

Kepemimpinan kepala sekolah menjadi unsur penting karena perubahan kurikulum memerlukan arah, dukungan, dan pengondisian organisasi. Leithwood, Harris, dan Hopkins (2020) menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah memengaruhi pembelajaran terutama melalui perbaikan kondisi kerja, kapasitas guru, dan fokus organisasi. Meta-analisis Robinson, Lloyd, dan Rowe (2008) juga menunjukkan bahwa kepemimpinan yang terlibat dalam pembelajaran dan pengembangan guru memiliki pengaruh lebih kuat terhadap hasil peserta didik daripada kepemimpinan yang hanya berorientasi pada administrasi. Temuan di SMP IT IQRA Stabat menunjukkan bahwa peran kepala sekolah telah tampak dalam koordinasi dan fasilitasi, tetapi perlu

terus diarahkan pada pembinaan praktik pembelajaran.

Kemauan guru belajar merupakan modal penting, namun pelatihan yang efektif harus memiliki fokus isi, pembelajaran aktif, koherensi, durasi memadai, dan partisipasi kolektif (Desimone, 2009). Opfer dan Pedder (2011) menegaskan bahwa pembelajaran profesional guru merupakan hasil interaksi antara individu, sekolah, dan aktivitas belajar. Artinya, pelatihan sesaat tidak cukup apabila tidak diikuti praktik, umpan balik, dukungan pimpinan, dan kesempatan refleksi. Karena itu, sekolah memerlukan komunitas belajar profesional yang terjadwal.

Komunitas belajar profesional memungkinkan guru berbagi masalah, mengembangkan

perangkat, mengobservasi praktik, dan menggunakan bukti hasil belajar untuk perbaikan. Stoll, Bolam, McMahon, Wallace, dan Thomas (2006) serta Vescio, Ross, dan Adams (2008) menunjukkan bahwa komunitas profesional yang berfokus pada pembelajaran dapat mengubah praktik mengajar dan mendukung hasil peserta didik. Temuan bahwa guru SMP IT IQRA Stabat telah melakukan diskusi informal merupakan fondasi yang dapat ditingkatkan menjadi forum terstruktur dengan agenda, produk, dan evaluasi.

Keterbatasan sarana, khususnya media digital, memengaruhi variasi pembelajaran. Integrasi teknologi tidak cukup melalui pengadaan perangkat, tetapi juga memerlukan keterampilan, keyakinan pedagogis, budaya sekolah, akses, dan dukungan kepemimpinan (Hew & Brush, 2007; Ertmer & Ottenbreit-Leftwich, 2010). Karena itu, prioritas sarana perlu disertai pelatihan pemanfaatan, pengaturan akses, dan pemeliharaan.

Beban administrasi merupakan hambatan karena guru harus membagi waktu antara penyusunan dokumen dan interaksi pembelajaran.

Akuntabilitas tetap diperlukan, tetapi format harus berfungsi sebagai alat berpikir dan bukti pelaksanaan, bukan pengulangan dokumen. Fullan (2016) mengingatkan bahwa perubahan pendidikan mudah kehilangan fokus ketika energi pelaksana terserap pada kepatuhan teknis. Penyederhanaan administrasi dapat dilakukan melalui format bersama, bank perangkat, pembagian tugas tim, dan penggunaan dokumen yang benar-benar dipakai untuk mengajar serta mengevaluasi.

4. Strategi Sekolah dan Arah Penguatan

Sekolah merespons hambatan melalui pelatihan bertahap, diskusi antarguru, pembelajaran mandiri, bantuan tim kurikulum, pengajuan fasilitas, serta komunikasi dengan dinas dan pengawas. Penguatan selanjutnya perlu dirangkai dalam satu siklus: pemetaan kebutuhan lokal berbasis data; penetapan prioritas; penerjemahan ke dalam capaian, aktivitas, sumber belajar, dan asesmen; pendampingan guru; serta evaluasi untuk revisi KOSP. Diferensiasi pembelajaran perlu didasarkan pada kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik

dengan tujuan dan asesmen yang jelas (Tomlinson, 2014).

Perbaikan sekolah perlu menghubungkan kepemimpinan, kapasitas profesional, iklim belajar, panduan pembelajaran, serta relasi orang tua-masyarakat dalam satu sistem (Bryk et al., 2010). Partisipasi masyarakat perlu bergerak dari kehadiran pada kegiatan menuju kemitraan yang berfokus pada pembelajaran, misalnya sebagai sumber informasi kebutuhan, narasumber proyek, pemberi umpan balik, dan pendukung sumber belajar (Goodall & Montgomery, 2014).

Secara keseluruhan, adaptasi KOSP di SMP IT IQRA Stabat telah bergerak dari kepatuhan administratif menuju kurikulum yang lebih kontekstual. Kekuatan utamanya terletak pada identitas Islam, komitmen pimpinan, kemauan guru, dan terbukanya partisipasi orang tua. Kelemahannya terletak pada kedalaman pemetaan lokal, pemerataan kompetensi guru, kesederhanaan administrasi, kecukupan sarana, dan ketepatan indikator evaluasi. Temuan ini menegaskan bahwa otonomi kurikulum akan menghasilkan mutu apabila disertai kapasitas profesional,

kepemimpinan pembelajaran, dukungan sumber daya, dan siklus perbaikan yang berbasis bukti.

D. Kesimpulan

Adaptasi implementasi KOSP di SMP IT IQRA Stabat dilaksanakan melalui sosialisasi kebijakan, pembentukan tim, analisis kebutuhan, penyusunan dokumen, review, dan pengesahan. Proses tersebut telah melibatkan pimpinan sekolah dan guru serta menggunakan regulasi, panduan, diskusi sejawat, dan pembelajaran mandiri sebagai sumber rujukan. Meskipun alur kerjanya telah terbentuk, pemahaman guru belum merata sehingga pendampingan implementasi di kelas masih perlu diperkuat.

Pengembangan mutu berbasis kebutuhan lokal dilakukan melalui integrasi nilai Islam, budaya Melayu, keterampilan praktis, kegiatan sosial, dan proyek Profil Pelajar Pancasila. Integrasi ini mendukung karakter religius, relevansi pembelajaran, kecakapan hidup, kepedulian sosial, dan motivasi peserta didik. Namun, pemetaan kebutuhan lokal dan evaluasi kontribusinya terhadap capaian pembelajaran belum

dilakukan secara khusus dan sistematis.

Faktor pendukung implementasi meliputi komitmen kepala sekolah, kemauan guru belajar, pelatihan dan supervisi dinas, serta partisipasi orang tua dan masyarakat. Faktor penghambat meliputi ketimpangan pemahaman guru, beban administrasi, keterbatasan sarana, masa transisi, dan variasi kesiapan guru. Sekolah telah merespons melalui pelatihan, diskusi, bantuan tim kurikulum, pembelajaran mandiri, pengajuan fasilitas, dan koordinasi dengan pengawas. Penguatan selanjutnya perlu difokuskan pada pemetaan lokal berbasis data, komunitas belajar profesional, penyederhanaan administrasi, peningkatan sarana, kemitraan masyarakat, serta indikator evaluasi KOSP yang spesifik dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Komparasi implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877-5889.
- Ball, S. J., Maguire, M., & Braun, A. (2012). *How schools do policy: Policy enactments in secondary schools*. Routledge.
- Braun, A., Ball, S. J., Maguire, M., & Hoskins, K. (2011). *Taking context seriously: Towards explaining policy enactments in the secondary school*. *Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education*, 32(4), 585-596. <https://doi.org/10.1080/01596306.2011.601555>
- Bryk, A. S., Sebring, P. B., Allensworth, E., Luppescu, S., & Easton, J. Q. (2010). *Organizing schools for improvement: Lessons from Chicago*. University of Chicago Press.
- Coburn, C. E. (2003). Rethinking scale: Moving beyond numbers to deep and lasting change. *Educational Researcher*, 32(6), 3-12. <https://doi.org/10.3102/0013189X032006003>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Desimone, L. M. (2009). Improving impact studies of teachers' professional development: Toward better conceptualizations and measures. *Educational Researcher*, 38(3), 181-199. <https://doi.org/10.3102/0013189X08331140>
- Ertmer, P. A., & Ottenbreit-Leftwich, A. T. (2010). Teacher technology change: How knowledge, confidence, beliefs, and culture intersect. *Journal of Research on Technology in Education*, 42(3), 255-284. <https://doi.org/10.1080/15391523.2010.10782551>
- Fullan, M. (2016). *The new meaning of educational change* (5th ed.). Teachers College Press.
- Gay, G. (2018). *Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice* (3rd ed.). Teachers College Press.
- Goodall, J., & Montgomery, C. (2014). Parental involvement to parental engagement: A continuum. *Educational Review*, 66(4), 399-410.

- Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. *Assessment & Evaluation in Higher Education*, 18(1), 9-34. <https://doi.org/10.1080/0260293930180102>
- Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. *Educational Technology Research and Development*, 55, 223-252.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). Panduan pengembangan Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Kemendikbudristek.
- Ladson-Billings, G. (1995). Toward a theory of culturally relevant pedagogy. *American Educational Research Journal*, 32(3), 465-491.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management*, 40(1), 5-22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moll, L. C., Amanti, C., Neff, D., & Gonzalez, N. (1992). Funds of knowledge for teaching: Using a qualitative approach to connect homes and classrooms. *Theory Into Practice*, 31(2), 132-141.
- Opfer, V. D., & Pedder, D. (2011). Conceptualizing teacher professional learning. *Review of Educational Research*, 81(3), 376-407. <https://doi.org/10.3102/0034654311413609>
- Priestley, M., Biesta, G., & Robinson, S. (2015). *Teacher agency: An ecological approach*. Bloomsbury Academic.
- Rahmadayanti, D., & Hartoyo, A. (2022). Potret Kurikulum Merdeka, wujud merdeka belajar di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 7174-7187.
- Rahayu, R., Rosita, R., Rahayuningsih, Y. S., Hernawan, A. H., & Prihantini. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di sekolah penggerak. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6313-6319. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3237>
- Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
- Robinson, V. M. J., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. *Educational Administration Quarterly*, 44(5), 635-674.
- Sallis, E. (2014). *Total quality management in education* (3rd ed.). Routledge.
- Spillane, J. P., Reiser, B. J., & Reimer, T. (2002). Policy implementation and cognition: Reframing and refocusing implementation research. *Review of Educational Research*, 72(3), 387-431.
- Stoll, L., Bolam, R., McMahon, A., Wallace, M., & Thomas, S. (2006). Professional learning communities: A review of the literature. *Journal of Educational Change*, 7(4), 221-258.
- Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners* (2nd ed.). ASCD.
- Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. *Teaching and Teacher Education*, 24(1), 80-91.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.